

**PARTISIPASI MASYARAKAT MEMODERASI HUBUNGAN TRANSPARANSI
DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**

**Siti Rohmah¹, Martinus Robert², Pantas P. Pardede³, Nadiya Yunan⁴, Diana Siang⁵,
Rika Humairah⁶**

¹²³⁴⁵⁶Prodi Akuntansi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

[¹sitirohmah1407@uwgm.ac.id](mailto:sitirohmah1407@uwgm.ac.id)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa dimoderasi Partisipasi Masyarakat. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif dan metode sampling jenuh sebagai metode pemilihan sampel yang berjumlah 130 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diukur dengan skala likert. Teknik analisis data yang digunakan, Analisis Regresi Linear Berganda dengan menggunakan program SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian Partisipasi Masyarakat - Transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan Dana, sedangkan Akuntabilitas tidak dipengaruhi artinya Partisipasi masyarakat tidak dapat memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana. Selain itu, Pengelolaan dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap Pembangunan Infrastruktur,

Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur, Partisipasi Masyarakat

ABSTRACT

This research aims to test how much influence Transparency and Accountability have on Village Fund Management moderated by Community Participation. The method in this research is to use quantitative methods and saturated sampling methods as a method for selecting a sample of 130 respondents. The data collection technique uses a questionnaire which is measured using a Likert scale. The data analysis technique used is Multiple Linear Regression Analysis using the SPSS program.

The research results show that Transparency and Accountability have a positive and significant effect on Village Fund Management. Thus, Community Participation - Transparency has a significant effect on Fund Management, while Accountability is not influenced, meaning that Community Participation cannot moderate the influence of accountability on fund management. Apart from that, village fund management has a significant effect on infrastructure development.

Keywords: Transparency, Accountability, Village Fund Management, Infrastructure Development, Community Participation

PENDAHULUAN

Perkembangan sasaran pembangunan di negara ini sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang memprioritaskan pemerintah daerah, sehingga ke tingkat seluruhan maupun perdesaan sebab itu diperlukan adanya tata kelola pemerintahan oleh keuangan yang baik. Akuntansi pemerintahan memainkan peran penting dalam menegakkan tata kelola yang baik, yang mencakup pengelolaan keuangan di seluruh tingkatan

pemerintahan. Saat ini, terdapat penekanan yang signifikan pada peningkatan tata kelola desa, terutama melalui berbagai inisiatif pendanaan yang diprakarsai oleh pemerintah kabupaten/kota.

Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana pemerintah memberikan wewenang otonomi kepada desa untuk mengelola dana desa secara independen. Dengan maksimal untuk memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa agar dapat meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Dengan demikian, dilakukan upaya konkret untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan dampak positif yang signifikan padaperkembangan di pedesaan.

Dana yang disalurkan ke desa untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengembangan masyarakat di desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah desa untuk memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola dana desa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pemanfaatan dana desa tersebut harus dapat mencegah potensi permasalahan di masa depan, mengingat maraknya kasus penyelewengan dana yang terjadi di beberapa desa di Indonesia. Oleh karena itu, pengelola dana desa harus di landaskan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan. (Mutia, 2019)

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, landasan hukum yang mengatur tata cara pengelolaan dana desa di Malinau, menyatakan penyelenggaraan Pemerintah Desa, Perencanaan, Penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan dana desa akan lebih transparan dan akuntabel, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur desa. Partisipasi Masyarakat juga dianggap penting karena dapat memoderasi penggunaan dana tersebut sesuai dengan kebutuhandan kepentingan lokal.

Keterlibatan masyarakat dalam mengelola dana desa diarahkan untuk memastikan bahwa keputusan mengenai alokasi dana berasal dari masukan langsung dari masyarakat, memanfaatkan wawasan lokal mereka yang mendalam mengenai kebutuhan penting seperti infrastruktur, kesejahteraan, dan kesejahteraan masyarakat. Transparansi, yang ditandai dengan penyajian informasi terkait yang terbuka dan jujur, memfasilitasi aksesibilitas publik, memberikan persamaan hak dan kesempatan bagi individu untuk memahami aspek-aspek yang berkaitan dengan kepentingan, tujuan, dan kebutuhan mereka.

Tabel 1
Anggaran Pembangunan Desa Naawang Baru

Tahun	Keterangan	Anggaran (Rp)
2020	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.272.580.000
2021	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.351.082.000
2022	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 547.679.400
2023	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 623.504.000
Jumlah		Rp. 3.794.845.400

Sumber: Pengelolaan Dana Desa Nawang Baru,2024

Dari tabel diatas anggaran pelaksanaan pembangunan desa menunjukkan fluktuasi/perubahan yang tidak stabil dalam periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 1.272.580.000, meningkat menjadi Rp. 1.351.082.000 pada tahun 2021. Namun, anggaran mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022 menjadi Rp. 547.679.400, yang mungkin disebabkan oleh penyesuaian kebijakan atau perubahan prioritas. Pada tahun 2023, anggaran Kembali meningkat menjadi Rp. 623.504.000, meskipun masih berada dibawah angka anggaran pada tahun 2020 dan 2021. Fluktuasi ini mencerminkan perubahan dalam kebutuhan dan prioritas pembangunan desa yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal.

Fenomena masalah penelitian berdasarkan studi pendahuluan ini berakar dari dua isu utama yang dihadapi oleh Desa Nawang Baru. Pertama, hasil observasi menunjukkan bahwa banyak warga desa yang tidak memahami secara jelas tentang penggunaan dan pengelolaan dana desa. Kurangnya informasi ini menciptakan ketidakpastian dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana. Kedua, infrastruktur desa, khususnya jalan-jalan di kawasan pemukiman, mengalami kondisi yang kurang memadai. Jalan yang kurang terawat menghambat kelancaran aktivitas sehari-hari dan akses ke fasilitas penting, serta dapat menghambat perkembangan ekonomi desa.

Masalah infrastruktur yang buruk tidak hanya mempengaruhi mobilitas warga tetapi juga berdampak negatif pada kualitas hidup dan potensi ekonomi desa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi pengelolaan dana desa dan efektivitas pembangunan infrastruktur di Desa Nawang Baru. Beberapa kajian yang berkaitan dengan dana desa memberikan hasil yang berbeda – beda. Perbedaan hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilaksanakan merupakan suatu *research gap* tersendiri yang perlu dijadikan suatu kajian lebih lanjut agar program tersebut dapat terselenggara dengan baik. (Studi Desa, 2024)

Teori *stewardship* (Yanto, 2020) menggambarkan kaitan antara organisasi pada pemerintahan. Pemerintah sebagai *steward* yang mana kewajibannya mengelola sumber daya manusia serta rakyat selaku pemilik sumber daya manusia dalam penelitian ini teori *stewardship* menyatakan bahwa pemerintah melaksanakan pekerjaannya untuk mencapai tujuan dari kepentingan masyarakatnya. Teori ini percaya bahwa manusia secara alami dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan punya integritas yang baik. Jadi, pemerintah dianggap bisa diandalkan untuk melakukan hal-hal yang baik demi kepentingan bersama.

Penelitian sebelumnya terkait pengelolaan desa yang dipengaruhi factor transparansi dan akuntabilitas mendapatkan hasil yang berbeda. Penelitian Matia dan I made (2019) memiliki hasil yang positif baik variable transparansi, akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat. Penelitian Risca, (2020) mendapat hasil terkait variabel Transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa dan variabel yang lain memberikan hasil yang positif. Berdasarkan fenomena yang diuraikan dan hasil penelitian sebelumnya, terdapat fokus penelitian untuk mengetahui dampak tingkat transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa dan menambahkan variabel dependen lainnya yang mempengaruhi yaitu pembangunan infrastruktur. Infrastruktur merupakan salah satu infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena dapat memudahkan segala akses dan aktivitas yang dilakukan masyarakat. Oleh karena itu infrastruktur jalan dapat membantu tingkat kesejahteraan pada masyarakat (Rezy, 2022). Peneliti tertarik mengangkat tema dengan mempertimbangkan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi yang

mempengaruhi interaksi antara transparansi, akuntabilitas, dan hasil pengelolaan dana desa dan pembangunan infrastruktur.

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS TEORI STEWARDSHIP

Teori Stewardship (Yanto, 2020) mengilustrasikan situasi seorang pimpinan lebih memprioritaskan pada kepentingan umum sebagai tujuan utama, dari pada terpengaruh oleh kepentingan individu. Pendekatan ini berlaku untuk penelitian akuntansi yang dilakukan di sektor publik, seperti yang dilakukan oleh entitas pemerintah. Mengacu pada pertanggungjawaban dan keterbukaan pengelolaan dana desa, maka dimana pemerintah desa dituntut untuk mampu menjawab pertanyaan masyarakat mengenai pengelolaan dana desa. Peneliti akan menerapkan teori stewardship karena teori ini menggambarkan pemerintah daerah sebagai lembaga yang dapat diandalkan, mampu mewakili keinginan masyarakat, memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat, dan menjaga keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya. Keyakinan dalam pengelolaan finansial menjadi faktor kunci dalam mencapai target ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan efektif. Teori kepengurusan juga menekankan peran pemerintah daerah sebagai entitas yang memiliki kapabilitas untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dengan tingkat optimal. (Wiguna, 2020)

PENGELOLAAN DANA DESA

Penyelenggaraan keuangan desa mencakup setiap tahapan, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga pencatatan, pelaporan, dan jaminan akuntabilitas aspek keuangan desa. Prinsip-prinsip pedoman pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi aktif, dan dilaksanakan secara konsisten dan disiplin dalam pemanfaatan anggaran. (Weni, 2017)

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Pembangunan Infrastruktur merupakan rangkaian komponen fisik yang saling terhubung dan saling mempengaruhi satu sama lain. Infrastruktur desa mencakup rangkaian sarana fisik, fasilitas dan pelayanan dasar yang mendukung untuk memenuhi kehidupan masyarakat seperti jalan, jembatan, listrik dan telekomunikasi. Dengan fungsinya yang optimal, infrastruktur ini memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur desa bertujuan membangun masyarakat pedesaan dengan mengutamakan kebutuhan mereka. Pembangunan desa adalah bagian yang sangat penting dari pembangunan di tingkat nasional dan memiliki peran kunci dalam mencapai kesuksesan pembangunan secara menyeluruh.

TRANSPARANSI

Putra & Rasmini (2019) menyatakan bahwa transparansi mencakup prinsip kesetaraan dalam hak dan akses informasi bagi masyarakat untuk memahami proses anggaran yang berkaitan dengan kesejahteraan umum. Transparansi merupakan prinsip penting dalam pemerintahan yang menuntut agar pemerintah memberikan informasi secara terbuka tentang kebijakan, keputusan, dan keuangan mereka kepada masyarakat. Ini berarti semua orang harus bisa dengan mudah mendapatkan informasi tanpa ada halangan. Tujuan transparansi adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah, melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, transparansi membantu menjaga kejujuran dan kinerja pemerintahan serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga negara.

AKUNTABILITAS

Ismawati (2019) Pada dasarnya, konsep akuntabilitas berakar dari gagasan bahwa setiap tindakan harus dipertanggungjawabkan kepada pihak atau lembaga yang memberikan izin untuk melaksanakan program tertentu, serta pentingnya tersedianya dan kemudahan akses

masyarakat terhadap laporan keuangan. Akuntabilitas merupakan prinsip panduan yang menggarisbawahi bahwa semua kegiatan dan hasil yang dihasilkan dari pelaksanaan tanggung jawab pemerintah di tingkat desa harus dijelaskan secara wajar dan bertanggung jawab kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Dengan kata lain, pemerintah Desa bertanggung jawab untuk mempertanggung jawabkan segala langkah yang diambil dan hasil akhir dari kegiatan yang dilaksanakan kepada masyarakat, sejalan dengan ketentuan hukum yang ada.

PARTISIPASI MASYARAKAT

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif warga dalam menyampaikan aspirasi, ide, dan kebutuhan mereka terkait penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Melalui berbagai cara, seperti memberikan masukan, menghadiri pertemuan, atau bergabung dalam program- program komunitas, partisipasi ini memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih memahami dan memenuhi harapan masyarakat secara efektif (Juniarti dkk, 2022),

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. (Sugiyono, 2018:134). Adapun hipotesis pada penelitian ini :

H1: tingkat transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

H2: tingkat akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

H3: Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

H4: Partisipasi masyarakat memoderasi terhadap hubungan antar tingkat transparansi dengan pengelolaan dana desa.

H5: Partisipasi masyarakat memoderasi terhadap hubungan antara tingkat akuntabilitas dengan pengelolaan dana desa.

H6: Pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap pembangunan infrastruktur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Studi kasus pada Desa Nawang Kaltara adalah subjek penelitian ini tahun 2024. Metode pengambilan sampel sampling jenuh, atau berdasarkan standar yang ditetapkan oleh peneliti, digunakan untuk pengambilan sampel sebanyak 130 responden. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu menyebarkan kuisioner penelitian. Analisis regresi linear berganda dilakukan menggunakan Statistical Package Social Sciences (SPSS) versi 26.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keabsahan analisis regresi berganda harus diperiksa. Terlebih dahulu, data yang berhasil dikumpulkan diuji untuk memastikan apakah memenuhi uji validasi dan reliabilitas serta asumsi klasik. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik termasuk uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi

Tabel 2
Hasil Analisis Statistik Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transparansi	130	16.00	20.00	18.6846	1.00414
Akuntabilitas	130	18.00	20.00	19.0077	0.92758
Partisipasi Masyarakat	130	17.00	20.00	19.0231	0.93565
Pengelolaan Dana Desa	130	16.00	20.00	18.8462	1.01509

Pembangunan Infrastruktur	130	16.00	20.00	18.7615	1.04773
---------------------------	-----	-------	-------	---------	---------

Nilai r tabel ditentukan berdasarkan jumlah responden (n) = 130, dengan derajat kebebasan (df) = n-2 = 128, sehingga didapatkan nilai r tabel sebesar 0,225.

Tabel 3. Uji Validitas

No	Variabel	Indikator	r hitung	r tabel (df=130)	ket
1	Transparansi	1	0,458	0,225	Valid
		2	0,411		Valid
		3	0,441		Valid
		4	0,451		Valid
		5	0,531		Valid
2	Akuntabilitas	1	0,521	0,225	Valid
		2	0,404		Valid
		3	0,456		Valid
		4	0,504		Valid
		5	0,411		Valid
3	Partisipasi Masyarakat	1	0,466	0,225	Valid
		2	0,466		Valid
		3	0,522		Valid
		4	0,458		Valid
		5	0,445		Valid
4	Pengelolaan Dana Desa	1	0,531	0,225	Valid
		2	0,461		Valid
		3	0,535		Valid
		4	0,437		Valid
		5	0,437		Valid
5	Pembangunan Infrastruktur	1	0,515	0,225	Valid
		2	0,434		Valid
		3	0,495		Valid
		4	0,417		Valid
		5	0,519		Valid

Uji ini dilakukan dengan menggunakan statistik Cronbach's alpha, di mana nilai setiap variabel harus lebih besar atau sama dengan 0,60

Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpa	Nilai Standar	Ket
Transparansi	0,622	0,6	Reliabel
Akuntabilitas	0,709	0,6	Reliabel
Partisipasi Masyarakat	0,840	0,6	Reliabel
Pengelolaan Dana Desa	0,719	0,6	Reliabel

Pembangunan Infrastruktur	0,748	0,6	Reliabel
---------------------------	-------	-----	----------

Sumber : Data diolah peneliti, 2024

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien R²
(Pengelolaan dana desa)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate
1	.719 ^a	0.542	0.426	1.01978

a. Predictors: (Constant) Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Transparansi

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien R²
Pembangunan Infrastruktur)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the estimate
1	.924 ^a	0.677	0.438	1.04.046

Tabel 6
Hasil Uji t Parsial
(pengelolaan Dana Desa)

Model		Unstandarized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0.029	0.156		-0.186	0.853
	Transparansi	0.472	0.070	0.467	6.758	0.000
	Akuntabilitas	0.536	0.069	0.490	7.775	0.000
	Partisipasi Masyarakat	1.270	2.901	1.171	0.438	0.662
	X1xZ	0.054	0.099	4.415	2.548	0.026
	X2xZ	-0.017	0.106	-0.419	-0.161	0.872

Berdasarkan hasil uji statistik t diatas, maka dapat diketahui hasilpengujian hipotesis sebagai berikut :

1. Pengujian tranparansi (X_1) terhadap pengelolaan dana desa (Y_1) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu ($6.758 > 1.97912$) dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima, yang artinya transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.
2. Pengujian akuntabilitas (X_2) terhadap pengelolaan dana desa (Y_1) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu ($7.775 > 1.97912$) dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima,

yang artinya akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

3. Pengujian Partisipasi masyarakat (Z) Terhadap pengelolaan dana desa (Y₁) maka dapat disimpulkan bahwa H₃ ditolak, yang artinya partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Pengujian partisipasi masyarakat (Z) dalam memoderasi transparansi(X₁) terhadap pengelolaan dana desa (Y₁)
4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu ($2.548 > 1.97912$) dengan nilai signifikan sebesar $0,026 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H₄ diterima, yang artinya partisipasi masyarakat dapat memoderasi pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa.
5. Pengujian partisipasi masyarakat (Z) dalam memoderasi akuntabilitas (X₂) terhadap pengelolaan dana desa (Y₁) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat diketahui $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu ($-0.161 < 1.97912$) dengan nilai signifikan sebesar $0,872 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H₅ ditolak, yang artinya partisipasi masyarakat tidak dapat memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa.

Tabel 7
Hasil Uji t (Parsial)
Coefficients^a

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.759	1.685		8.759	0.000
	Pengelolaan dana desa	0.212	0.089	0.206	2.379	0.019

a. Dependent Variable: Pembangunan Infrastruktur

Sumber : Data diolah peneliti, 2024

6. Pengujian pengelolaan dana desa (Y₁) terhadap pembangunan infrastruktur (Y₂) , Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keenam diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu ($2.379 > 1.97912$) dengan nilai signifikan sebesar $0,019 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H₆ diterima, yang artinya pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur.

Pembahasan

Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan dalam proses pengelolaan dana desa memiliki dampak yang signifikan. Ini berarti bahwa ketika proses pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan, yaitu dengan memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada semua pihak terkait, seperti masyarakat desa, pemerintah daerah, dan lembaga pengawas, maka akan meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kepercayaan terhadap pengelolaan tersebut. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian sebelumnya Mutia dan I made (2019) dimana Transparansi berpengaruh positif. Dengan kata lain, transparansi memainkan peran penting dalam mencegah penyalahgunaan dana desa, memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan memungkinkan masyarakat desa untuk terlibat secara aktif dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait penggunaan dana tersebut

Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, menunjukkan bahwa tingkat

akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa memiliki dampak yang signifikan. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian sebelumnya Mutia dan I made (2019) juga Risca (2020) dimana Akuntabilitas berpengaruh positif Akuntabilitas mengacu pada kewajiban untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil dalam pengelolaan dana desa. Ketika tingkat akuntabilitas tinggi, pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa akan lebih cenderung untuk bertindak secara transparan, menjelaskan setiap langkah dan keputusan yang diambil kepada pihak-pihak terkait. Hal ini memungkinkan untuk pemantauan yang lebih baik atas penggunaan dana desa dan meminimalkan risiko penyalahgunaan atau korupsi. Dengan demikian, meningkatnya akuntabilitas dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Ini juga dapat mendorong pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya untuk menjalankan pengelolaan dana desa dengan lebih bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pernyataan bahwa partisipasi masyarakat dapat memoderasi pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa dapat mempengaruhi atau mengendalikan dampak dari tingkat transparansi yang ada. Pada penelitian sebelumnya terdapat hasil yang Positif Mutia dan I made (2019) juga Risca (2020) Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat dapat berfungsi sebagai pengontrol atau pemantik bagi transparansi. Ketika masyarakat terlibat secara aktif dalam pengelolaan dana desa, mereka memiliki akses langsung ke informasi dan proses pengambilan keputusan. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih memahami bagaimana dana desa digunakan dan untuk apa, serta memberikan masukan dan umpan balik secara langsung.

Partisipasi masyarakat tidak dapat memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa, itu mengimplikasikan bahwa keterlibatan aktif masyarakat tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian berbdang arah dengan penelitian sebelumnya Mutia dan I made (2019) juga Risca (2020) dimana mendapatkan hasil yang signifikan. Keterlibatan masyarakat memungkinkan untuk pemantauan dan pengawasan yang lebih baik terhadap penggunaan danadesa. Ketika masyarakat terlibat secara aktif dalam pemantauan, mereka dapat menyoroti ketidaksesuaian antara penggunaan dana dengan kebutuhan atau prioritas lokal, serta mengidentifikasi potensi penyimpangan atau penyalahgunaan. Jadi, sementara partisipasi masyarakat mungkin tidak langsung mengatur akuntabilitas, keterlibatan mereka memiliki potensi besar untuk memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa melalui pemantauan, pengawasan, dan tekanan publik.

Partisipasi masyarakat juga memberikan hasil yang tidak signifikan terhadap pengaruhnya kepada pengelolaan desa. Hasil penelitian berbanding arah dengan penelitian sebelumnya Mutia dan I made (2019) juga Risca (2020) dimana mendapatkan hasil yang signifikan. Pengelolaan desa diharuskan dalam hal ini adalah Desa dan perangkatnya dalam mengelola dana tersebut dimana masyarakat dapat diberikan kesejahteraan bagi pengelolaan dana tersebut.

Pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur berarti bahwa cara dana desa dikelola memiliki dampak langsung terhadap kemajuan dan kualitas pembangunan infrastruktur di desa. Dana desa merupakan sumber daya keuangan yang penting bagi pemerintah desa untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang diperlukan, seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, listrik, dan fasilitas publik lainnya. Ketika dana desa dikelola dengan baik, efisien, dan transparan, hal itu akan membantu memastikan bahwa

alokasi dana desa digunakan secara tepat dan efektif untuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat desa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil olah data dari penggunaan SPSS pada penelitian ini ditarik simpulan sebagai berikut Hasil uji pada variabel transparansi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana desa; Hasil uji pada variabel akuntabilitas menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana desa; Hasil uji memperlihatkan bahwa variabel partisipasi masyarakat dalam memoderasi transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa; Hasil uji memperlihatkan bahwa variabel partisipasi masyarakat dalam memoderasi akuntabilitas tidak dapat mempengaruhi variabel pengelolaan dana desa; Hasil uji memperlihatkan bahwa variabel partisipasi masyarakat dalam hubungan tidak dapat mempengaruhi variabel pengelolaan dana desa; Hasil pengujian pada variabel pengelolaan dana desa menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Farida., Jati., dkk (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol 11 (1) <https://doi.org/10.22219/jaa.v1i1>
- Humaeroh, S., Jumiaty, I. E., & Maulana, D. (2022) Analisis Transparansi Dalam Mei.org/10.25157/moderat.v8i1.2595
- I Made Yoga Darma Putra, Ni Ketut Rasmini. (2019) Pengaruh Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *e-jurnal Akuntansi*. Vol 28 (1) <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v28.i01.p06>
- Indah Setiarini Erganda, R.A. (2021) Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Studi pada 13 Desa Di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. *Jurnal Online Mahasiswa*. Vol8 (2)
- Juniarti, U., Inapty, B. A., & Rakhmawati, I. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Labuhan Haji dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*. 2(3) <https://doi.org/10.29303/risma.v2i3.298>
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Andi (anggota IKAPI)
- Matia Andriani (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa), *Journal of Accounting, Finance, and Auditing (JAFA)* Vol.1 (2) <https://doi.org/10.37673/jafa.v1i2.323>
- M. Rifqi, (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi Aparat Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Dana desa. *Skripsi (S1)*. Ekonomi. Universitas Islam Sultan Agung. Semarang.
- .Pahlevi., Susilo., dkk (2022) Pengaruh Transparansi Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*. VolKurn 5 (3) <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i3.2572>
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E- Jurnal Akuntansi*. Vol 28, 132.
- Purba, R. K. . & A. A. (2018). Public Accountability in Local Government.

- International Journal of Public Management*. Vol 1(1)
- Ratih Amelia F & Fefri Indra A. (2023). Pengaruh Transparansi, Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Nagari: Studi Empiris pada Nagari di kota Pariaman. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*. Vol 5 (3) <https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.824>
- Risca Syafira, S & Sri Rahayu. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan keuangan Desa (Studi kasus pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Cianjur tahun 2019), *e-proceeding of management*. Vol 7 (1)
- Riyanto, S., & Hatmawan, A. A. (2020). Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Solekhan, M (2014). Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat (Rev.ed). Malang Setara Press.
- Undang – undang Nomor 6 tahun 2014, tentang Desa
- Undang – Undang Nomor 28 tahun 2022, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Weny Ultrafiah (2017) Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. *Skripsi*. Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Palembang
- Wiguna, I. P. A. . & D. C. (2020). Analysis of Public Financial Management Accountability Implementation in East Java Province Indonesia. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*. Vol 12
- Yanto, E., Tinggi, S., & Ekonomi, I. (2020). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa The Influence Of Transparency, Participation And Accountability On The Performance Of Village Fundallocation Management And Village Fund. *Economy Deposit Journal Vol 2(2)*